

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 disusun guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Disusun berdasarkan standar akuntansi Pemerintahan (SAP), bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD wajib disusun dalam bentuk laporan keuangan Perangkat Daerah yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya, yang merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang berisikan penjelasan antara lain mengenai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan.

Laporan keuangan yang disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang menginformasikan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan, selain itu juga berfungsi membandingkan realisasi belanja sesuai anggaran yang ditetapkan. Membantu dalam menilai kondisi keuangan, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelaksanaan realisasi anggaran serta menentukan ketaatan terhadap kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah dan membantu menemukan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah adalah menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna antar lain meliputi legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai

kinerja perangkat daerah. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 perihal Penyajian Laporan Keuangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 147 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang;
- j. Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 73 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kabupaten Semarang;
- k. Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kabupaten Semarang;

- I. Peraturan Bupati Semarang No.52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Sistematika penulisan CALK terdiri dari 6 (enam) bab, antara lain :

Bab I. Pendahuluan

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika dari isi CALK.

Bab II. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2018.

Bab III. Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dan hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi menyajikan informasi tentang dasar kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah yang akan diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Berisi penjelasan untuk mengungkapkan informasi di dalam laporan keuangan antara lain yaitu pendapatan, belanja dan penjelasan pos-pos neraca yaitu aset, kewajiban dan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas.

Bab VI. Pengungkapan Lainnya, Informasi Non Keuangan

Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Antara lain penjelasan mengenai organisasi perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah Kab.Semarang dan penjelasan atas struktur kepegawaian atau sumber daya manusia yang dimiliki.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan dibidang keuangan daerah meliputi 2 (dua) aspek penting yaitu dibidang penerimaan pendapatan daerah (*revenue policy*) dan kebijakan dibidang pembelanjaan keuangan daerah (*expenditure policy*), kebijakan tersebut mempunyai peranan masing-masing yang sangat penting untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah.

a. Pendapatan

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang tidak memiliki pemasukan pendapatan daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

b. Belanja

Hal sebagai berikut yang merupakan kebijakan khusus untuk Belanja :

- 1) Setiap kelompok belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus bisa dirinci menurut jenis, obyek, dan rincian obyek;
- 2) Belanja yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan batas tertinggi dari pengeluaran dana;
- 3) Dalam pengelolaan belanja daerah perlu selalu diupayakan untuk terjadinya efisiensi dan efektivitas belanja dan upaya penghematan penggunaan dana;
- 4) Belanja daerah menampung semua pengeluaran untuk program dan kegiatan, termasuk belanja tidak langsung;
- 5) Belanja daerah juga menampung kegiatan luncuran dari kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak terselesaikan.

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Strategi sebagai langkah-langkah yang berisi program-program kegiatan untuk mewujudkan Visi dan Misi yaitu peningkatan kompetensi aparatur pemerintah yang profesional dan bertanggungjawab dalam pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan visi dan misi serta pelaksanaan pembangunan, daerah dapat lebih efektif dan efisien, maka dijabarkan dalam program-program pembangunan dimana pada masing-masing program/kegiatan ditentukan keluaran/ indikator sasaran yang hendak dicapai berikut pencapaian target kinerja sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Urusan : Non Urusan				
No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Target /Th	%
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Pengelolaan surat menyurat	Terlaksananya surat menyurat kantor dan cetak kop surat	4.500 surat keluar dan 5.500 surat masuk	100
2	Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik	15 jenis	100
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor	Perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor	12 jenis peralatan kantor	100
4	Penyediaan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Makan minum 52 pegawai, 24 exemplar harian umum dan pengisian tabung gas 12 bln	100
5	Penatausahaan administrasi keuangan SKPD	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan dan terbayarnya honor bendahara	12 bendel dokumen SPJ dan 5 org	100
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pengadaan alat kebersihan kantor dan terbayarnya honor jasa angkut sampah	28 item alat kebersihan dan 1 org	100

7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultaasi ke luar daerah	Terlaksananya rakoor dan konsultasi ke semarang, jateng/DIY, Jabar/Jatim, Jakarta dan Luar jawa	Smg 14 kl, Jateng/DIY 14 kl, Jabar/Jatim 6 kl, Jakarta 9 kl, Luar Jawa 3 kl	100
8	Penyediaan jasa tenaga pendukung/teknis perkantoran	Terbayarnya honor cleaning service dan honor instruktur senam	2 org cleaning dan 37 instruktur senam	100

Urusan : Non Urusan				
No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Target /Th	%
B	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	4 mobil, 10 sepeda motor	100
10	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan AC	14 unit AC	100

Urusan : Non Urusan				
No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Target /Th	%
C	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS			
11	Pemulangan pegawai yang pensiun	Terselesaikannya SK pensiun PNS di lingkungan Pemerintah Kab.Semarang	350 SK pensiun	100
12	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Terlaksananya pemberian uang duka	19 keluarga PNS	100

Urusan : Non Urusan				
No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Target /Th	%
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
13	Sosialisasi/bintek peraturan perundang-undangan	Terlaksannya sosialisasi peraturan kepegawaian	50 PNS dan 600 lbr leafet	100

Urusan : Non Urusan				
No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Target /Th	%
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
14	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Tersusunnya laporan bulanan (POK), LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan semesteran dan akhir tahun	6 dokumen, 42 buku	100

Urusan : Non Urusan				
No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Target /Th	%
F	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
15	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Tersusunnya laporan bulanan (POK), LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan semesteran dan akhir tahun	6 dokumen, 42 buku	100
16	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Tersusunnya dokumen Renja, KUA, RKA, DPA dan Progran Kerja	5 dokumen, 75 buku	100

Urusan : Wajib Kepegawaian				
No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Target /Th	%
G	Program Pendidikan Kedinasan (Kepegawaian)			
17	Pendidikan penjenjangan struktural	Terkirimnya peserta diklatpim Tk. II, III dan IV. Serta terlaksananya permintaan kegiatan <i>benchmarking</i> ke <i>bestpractise</i> diklatpim atau OL Pemkab/Kota atau lembaga diklat daerah lain	3 pejabat eselon II, 5 pejabat eselon III, 11 pejabat eselon IV & 2 kl penerimaan OL	100
18	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	1) Pengiriman PNS gol.II/d dan III/d mengikuti ujian dinas 2) Pengiriman PNS mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	30 PNS ujian dinas dan 200 PNS ujian UKPPI	100

Urusan : Wajib Kepegawaian				
No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Target /Th	%
H	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian)			
19	Pendidikan dan Pelatihan Prabatan bagi calon PNS daerah	CPNS golongan II dan III telah mengikuti dan lulus diklat prajabatan	103 CPNS (CPNS STTD 3 org Gol.III & 4 org Gol.II, CPNS Kemenkes 1 org Gol.III & 71 org Gol.II, CPNS Kementerian Pertanian 9 org Gol.III & 15 org Gol.II	100
20	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Terkirimnya PNS mengikuti diklat teknis dan fungsional sesuai dengan persyaratan jabatan	100 orang	100

Urusan : Wajib Kepegawaian				
No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Target /Th	%
I	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaian)			
21	Pembinaan Karier PNS	Terlaksananya pembinaan karier PNS melalui : 1) Promosi dan mutasi PNS dalam jabatan struktural 2) Pengangkatan, kenaikan, pembebasan sementara dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional 3) Rakoor jabatan fungsional 4) Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi	5 kl pelantikan, 200 SK fungsional, 1 kl rakoor jabatan fungsional, 2 kl seleksi JPT	100
22	Seleksi penerimaan calon PNS	Terlaksananya penetapan NIP CPNS dari Pusat/umum	400 orang	100
23	Penempatan PNS	Terlaksananya mutasi PNS dan terlaksananya pengangkatan CPNS menjadi PNS	230 SK mutasi dan 103 SK PNS	100
24	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS	Terprosesnya dan terselesaikannya SK kenaikan pangkat PNS dan terselesaikannya SPTKG PNS Gol.IV	1000 SK 1500 SPTKG	100
25	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terlaksananya pemberian piagam dan satya lencana	150 piagam dan satya lencana	100
26	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terlaksananya rapat tim penyelesaian kasus	21 kali rapat	100

27	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Pemberian bantuan biaya pendidikan S2	8 orang, 3 mahasiswa baru	100
28	Pembinaan kedisiplinan PNS	Terlaksananya sidak, rapat koordinasi kepegawaian, rakoor pembahasan hasil monev/sidak	19 kl sidak, 2 kl rakoor dan 5 kl monev	100
29	Penyusunan formasi PNS daerah	Tersusunnya buku formasi PNSD SKPD tahun 2018	4 buku formasi, 400 orang, penetapan formasi 2 jabatan	100
30	Manajemen pengelolaan data pegawai	1) Validasi dan entry data kepegawaian 2) Pemeliharaan file/dok pegawai 3) Laporan bulanan berupa mekanisme lap dan peremajaan data pegawai 4) Monitoring dan evaluasi manajemen pengelolaan data pegawai di OPD	8400 data PNS/CPNS, 12 laporan bulanan	100
31	Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas	Terbekalnya PNS yang akan purna tugas	70 orang, 4 angkatan	100

BAB III

IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara keseluruhan untuk target sampai dengan 31 Desember 2018 pencapaian kinerja keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang terealisasi sebesar Rp. 7.381.456.683,00 (85,53%) bila dibandingkan dengan total anggarannya yaitu sebesar Rp. 8.630.166.000,00. Belanja tersebut antara lain terdiri dari realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Apabila dikaitkan dengan belanja tidak langsung (gaji pegawai), dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.4.319.632.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.4.276.469.264,00 (99,00%). Dilihat dari program dan kegiatan sesuai bidang kewenangannya, dari anggaran yang tersedia untuk anggaran Belanja Langsung tahun anggaran 2018 sebesar Rp.4.310.534.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.3.104.987.419,00 (72,03%) yang teralokasi pada 10 (sepuluh) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018.

Berikut Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Urusan : Non Urusan			
No	Program dan Kegiatan		
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Pengelolaan surat menyurat	Target	Rp. 26.375.000,00
		Realisasi	Rp. 26.375.000,00 (100,00 %)
		Sisa	Rp. 0,00 (0,00 %)
		Keluaran	Terlaksananya surat menyurat kantor dan cetak kop surat 4.500 surat keluar dan 5.500 surat masuk
		Keterangan	-
2	Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik	Target	Rp. 110.000.000,00
		Realisasi	Rp. 79.947.675,00 (72,68 %)
		Sisa	Rp. 30.052.325,00 (27,32 %)

		Keluaran Keterangan	Terbayarnya jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan Sisa anggaran karena penghematan dari pemakaian listrik, telpon dan air
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 25.000.000,00 Rp. 25.000.000,00 (100,00 %) Rp. 0,00 (0,00 %) Terlaksananya perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor selama 12 bulan -
4	Penyediaan logistik kantor	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 60.000.000,00 Rp. 54.389.000,00 (90,65 %) Rp. 5.611.000,00 (9,35 %) Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (makan minum 52 pegawai selama 11 bulan, 1 harian umum) Sisa anggaran dari makan minum harian karena ada pegawai yang tugas belajar, cuti dan dinas luar
5	Penatausahaan administrasi keuangan SKPD	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 23.775.000,00 Rp. 23.775.000,00 (100,00 %) Rp. 0,00 (0,00 %) Tersusunnya dokumen administrasi keuangan (SPP, SPJ, SPPM) dan terbayarnya honor bendahara 12 bln sebanyak 5 org -
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 6.500.000,00 Rp. 6.493.500,00 (99,90 %) Rp. 6.500,00 (0,10 %) Terbayarnya honor jasa angkut sampah 1 org dan pembelian alat kebersihan kantor 28 item alat kebersihan Sisa anggaran dari penghematan pembelian alat kebersihan handsprayer dibawah indeks harga

7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Target Realisasi Sisa Keluaran	Rp. 169.457.000,00 Rp. 168.087.968,00 (99,19 %) Rp. 1.369.032,00 (0,81 %) Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah jateng 14 kali, DIY 14 kali, DKI 9 kali, Jabar/Jatim 6 kali dan luar jawa 3 kali
		Keterangan	Sisa anggaran dari penghematan BBM dan perjalanan dinas luar daerah
8	Penyediaan jasa tenaga pendukung/teknis perkantoran	Target Realisasi Sisa Keluaran	Rp. 59.626.000,00 Rp. 55.812.155,00 (93,60 %) Rp. 3.813.845,00 (6,40 %) Terbayarnya honor outsourcing 2 org dan honor instruktur senam 37 kali selama 11 bulan
		Keterangan	Sisa anggaran karena tahun 2018 BKD tidak bertugas sebagai penyelenggara senam bersama tingkat Kabupaten Semarang

Urusan : Non Urusan			
No	Program dan Kegiatan		
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Target Realisasi Sisa Keluaran	Rp. 40.000.000,00 Rp. 39.212.794,00 (98,03 %) Rp. 787.206,00 (1,97 %) Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 4 mobil dan 11 sepeda motor
		Keterangan	Sisa anggara karena nilai anggaran pajak kendaraan (DPA) lebih tinggi dari pada realisasinya
10	Pemeliharaan rutin/berkla perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Target Realisasi Sisa Keluaran	Rp. 6.000.000,00 Rp. 6.000.000,00 (100,00 %) Rp. 0,00 (0,00 %) Terlaksananya pemeliharaan AC sebanyak 14 unit selama 12 bulan
		Keterangan	-

Urusan : Non Urusan			
No	Program dan Kegiatan		
C	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS		
11	Pemulangan pegawai yang pensiun	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 24.525.000,00 Rp. 24.375.559,00 (99,39 %) Rp. 149.441,00 (0,61 %) Terselesaikannya SK pensiun PNS di lingkungan Pemerintah Kab.Semarang sebanyak 405 SK Sisa anggaran dari penghematan BBM dan perjalanan dinas luar daerah
12	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 12.000.000,00 Rp. 11.007.400,00 (91,73 %) Rp. 992.600,00 (8,27 %) Terlaksananya pemberian bantuan pemakaman bagi 20 keluarga PNS Sisa anggaran karena merupakan anggaran yang bersifat penyediaan bagi PNS yang tewas

Urusan : Non Urusan			
No	Program dan Kegiatan		
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
13	Sosialisasi/bintek peraturan perundang-undangan	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 14.500.000,00 Rp. 14.465.476,00 (99,76 %) Rp. 34.524,00 (0,24%) Terlaksananya sosialisasi peraturan kepegawaian dan pembuatan 600 lbr leaflet Sisa anggaran dari penghematan BBM dan perjalanan dinas luar daerah

Urusan : Non Urusan			
No	Program dan Kegiatan		
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
14	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 8.625.000,00 Rp. 8.625.000,00 (100,00 %) Rp. 0,00 (0,00 %) Tersusunnya laporan bulanan (POK), LAKIP, LKPJ, LPPD, LPJ, Laporan semesteran dan akhir tahun 6 dokumen 42 buku -

Urusan : Non Urusan			
No	Program dan Kegiatan		
F	Program Perencanaan		
15	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 13.630.000,00 Rp. 13.463.000,00 (98,77 %) Rp. 167.000,00 (1,23 %) Tersusunnya dokumen Renja, RKA/RKAS, DPA dan Progran Kerja 5 dokumen (75 buku) Sisa anggaran dari penghematan BBM dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Urusan : Wajib Kepegawaian			
No	Program dan Kegiatan		
G	Program Pendidikan Kedinasan (Kepegawaian)		
16	Pendidikan penjenjangan struktural	Target Realisasi Sisa Keluran Keterangan	Rp. 729.600.000,00 Rp. 726.964.146,00 (99,64 %) Rp. 2.635.854,00 (0,36 %) Terkirimnya peserta diklatpim Tk. II (3 orang), Tk.III (5 orang) dan Tk.IV (11 orang) dan penerimaan OL dari daerah lain sebanyak 2 kali Sisa anggaran karena <i>benchmarking</i> PIM II tidak dilaksanakan diluar negeri dan penghematan dari BBM dan perjalanan dinas luar daerah

17	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	Target	Rp. 29.825.000,00
		Realisasi	Rp. 14.933.000,00 (50,07 %)
		Sisa	Rp. 14.892.000,00 (49,93 %)
		Keluaran	1. Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas 2. Terlaksananya pengiriman PNS untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
		Keterangan	Sisa anggaran karena jumlah peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah tidak memenuhi target

Urusan : Wajib Kepegawaian			
No	Program dan Kegiatan		
H	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian)		
18	Pendidikan dan Pelatihan Prabatan bagi calon PNS daerah	Target	Rp. 411.866.000,00
		Realisasi	Rp. 407.561.927,00 (98,05 %)
		Sisa	Rp. 4.304.073,00 (1,95 %)
		Keluaran	Terkirimnya CPNS untuk mengikuti Diklat Prajabatan sebanyak 103 orang
		Keterangan	-
19	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Target	Rp. 239.800.000,00
		Realisasi	Rp. 238.788.326,00 (99,58 %)
		Sisa	Rp. 1.011.674,00 (0,42 %)
		Keluaran	Terkirimnya PNS mengikuti diklat teknis dan fungsional sesuai dengan persyaratan jabatan sebanyak 152 orang
		Keterangan	Sisa anggaran dari kontribusi pengiriman diklat

Urusan : Wajib Kepegawaian			
No	Program dan Kegiatan		
I	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaian)		
20	Pembinaan Karier PNS	Target	Rp. 354.800.000,00
		Realisasi	Rp. 171.801.538,00 (48,42 %)
		Sisa	Rp. 182.998.462,00 (51,58 %)

		Keluaran	<p>Terlaksananya pembinaan karier PNS melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pembinaan karier PNS melalui promosi dan mutasi PNS dalam jabatan struktural sebanyak 6 kl pelantikan 2. Terlaksananya pengangkatan, kenaikan, pembebasan sementara dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional sebanyak 448 SK fungsional 3. Terlaksananya rapat koordinasi jabatan fungsional sebanyak 1 kl 4. Terlaksananya Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi sebanyak 1 kl <p>Sisa anggaran dari pelaksanaan seleksi JPT yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2019</p>
21	Seleksi penerimaan calon PNS	<p>Target</p> <p>Realisasi</p> <p>Sisa</p> <p>Keluaran</p> <p>Keterangan</p>	<p>Rp. 1.418.000.000,00</p> <p>Rp. 473.986.659,00 (33,43 %)</p> <p>Rp. 944.013.341,00 (66,57 %)</p> <p>Terlaksananya pengadaan CPNS sebanyak 351 orang</p> <p>Sisa anggaran karena jumlah pelamar CPNS tidak memenuhi target sebanyak 10.430 orang dengan realisasi sebanyak 5.235 orang</p>
22	Penempatan PNS	<p>Target</p> <p>Realisasi</p> <p>Sisa</p> <p>Keluaran</p> <p>Keterangan</p>	<p>Rp. 24.600.000,00</p> <p>Rp. 24.201.066,00 (98,38 %)</p> <p>Rp. 398.934,00 (1,62 %)</p> <p>Terlaksananya mutasi PNS sebanyak 1963 orang dan terlaksananya pengangkatan CPNS menjadi PNS sebanyak 103 SK PNS</p> <p>Sisa anggaran karena ada PNS yang pensiun sehingga target tidak terpenuhi</p>

23	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 119.500.000,00 Rp. 117.476.017,00 (98,31 %) Rp. 2.023.983,00 (1,69 %) Terprosesnya dan terselesaikannya SK kenaikan pangkat PNS sebanyak 1573 orang dan terselesaikannya SPTKG PNS Gol.IV sebanyak 1079 SPTKG Sisa anggaran dari penghematan BBM dan perjalanan dinas
24	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 34.775.000,00 Rp. 29.664.908,00 (85,31 %) Rp. 5.110.092,00 (14,69 %) Terlaksananya pemberian piagam dan satya lencana sebanyak 54 orang Sisa anggaran anggaran yang turun dari pusat hanya 54 piagam dari pengajuannya sebanyak 150 piagam
25	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 44.800.000,00 Rp. 41.773.440,00 (93,24 %) Rp. 3.026.560,00 (6,76 %) Terlaksananya rapat tim penyelesaian kasus sebanyak 19 kali rapat Sisa anggaran karena laporan kasus pelanggaran dari PD menurun pada tahun 2018 sehingga rapat kasus dilaksanakan 19 kali
26	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Target Realisasi Sisa Keluaran Keterangan	Rp. 41.800.000,00 Rp. 41.800.000,00 (100,00 %) Rp. 0,00 (0,00 %) Terlaksananya pemberian bantuan pendidikan S2 sebanyak 3 orang -
27	Pembinaan kedisiplinan PNS	Target Realisasi Sisa	Rp. 14.825.000,00 Rp. 13.942.000,00 (94,04 %) Rp. 883.000,00 (5,96 %)

		Keluaran	Terlaksananya sidak 19 kali, rapat koordinasi kepegawaian 2 kali dan terlaksananya monitoring 5 kali
		Keterangan	Sisa anggaran karena rapat monev dilaksanakan hanya 3 kali
28	Penyusunan formasi PNS daerah	Target	Rp. 44.620.000,00
		Realisasi	Rp. 44.369.195,00 (99,44 %)
		Sisa	Rp. 250.805,00 (0,56 %)
		Keluaran	Tersusunnya buku formasi PNSD tahun 2018 sebanyak 4 buku formasi
		Keterangan	Sisa anggaran dari penghematan BBM dan perjalanan dinas
29	Manajemen pengelolaan data pegawai	Target	Rp. 52.085.000,00
		Realisasi	Rp. 52.085.000,00 (100,00 %)
		Sisa	Rp. 0,00 (0,00 %)
		Keluaran	1. Validasi dan entry data kepegawaian 8240 data PNS/CPNS
			2. Pemeliharaan file/dok pegawai 8240 data PNS/CPNS
			3. Laporan bulanan berupa mekanisme lap dan peremajaan data pegawai 12 laporan bulanan
			-
		Keterangan	
30	Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas	Target	Rp. 149.625.000,00
		Realisasi	Rp. 148.610.670,00 (99,32 %)
		Sisa	Rp. 1.014.330,00 (0,68 %)
		Keluaran	Terbekalnya PNS yang akan purna tugas sebanyak 280 orang
		Keterangan	Sisa anggaran dari penghematan BBM dan perjalanan dinas luar daerah

3.1 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara keseluruhan target sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 7.381.456.6383,00 (%), apabila dibandingkan dengan total anggarannya yaitu sebesar Rp. 8.630.166.000,00. Walaupun demikian dalam pencapaian target masih terdapat kendala yang dihadapi sehingga ada beberapa kegiatan yang pencapaian realisasi target tidak maksimal, hambatan tersebut antara lain :

Permasalahan yang dihadapi dibidang kepegawaian di Kabupaten Semarang berikut solusi yang akan dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang masih ada pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala BKN Nomor 2 tahun 2018, maka pendelegasian kewenangan penetapan SK Pensiun dilakukan PPK
2. - Sampai dengan bulan Desember 2018 masih terdapat 216 pejabat struktural eselon II, III dan IV belum mengikuti Diklatpim yang dipersyaratkan atau sebesar 31,17% dari jumlah pejabat struktural yang terisi
 - Pejabat struktural yang belum mengikuti diklat telah memasuki usia pensiun, sehingga semangat untuk mengikuti diklat cenderung menurun.
 - Percepatan pelaksanaan diklatpim dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pola kemitraan dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Pemda Kabupaten Semarang belum memiliki prasarana berupa gedung tempat penyelenggaraan.
 - Berkaitan dengan perencanaan kegiatan penerimaan *Benchmarking ke Best Practice*, tidak bisa menentukan secara tepat jumlah kabupaten/kota yang akan melaksanakan *Benchmarking* di Kabupaten Semarang
3. - Tingkat kelulusan peserta Ujian Dinas/UKPPI baru mencapai 71,03% sedangkan tidak lulus 28,97%
 - Masih terdapat PNS yang terlambat diusulkan untuk mengikuti Ujian Dinas/UKPPI akibatnya Jumlah peserta Ujian Dinas/UKPPI kurang dari jumlah yang dianggarkan sehingga penyerapan anggaran kurang
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah tidak menyelenggarakan pelatihan dasar calon PNS yang diangkat dari formasi umum, sehingga calon PNS golongan II dan III pola pembibitan STTD tidak dapat mengikuti pelatihan dsar di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
5. - Belum dapat menyusun kebutuhan jenis diklat secara tepat
 - Belum dapat mewujudkan hak dan kesempatan setiap PNS untuk mengikuti pengembangan kompetensi paling sedikit 20 JP per tahun sebagaimana diamanatkan

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS

- Belum memiliki informasi mengenai kompetensi PNS yang termuat dalam profil PNS
 - Belum adanya data hasil analisis pengembangan kompetensi yaitu tingkat kesenjangan tertentu yang digambarkan sebagai hasil perbandingan profil kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan yang diduduki
6. Masih ada beberapa formasi CPNS yang tidak terisi
 7. Masih kurangnya staf/pejabat pelaksana di OPD Kabupaten Semarang
 8. - Belum dapat menentukan secara tepat jumlah PNS yang akan mengikuti seleksi tugas belajar untuk setiap tahun
 - PNS terlambat menyampaikan laporan perkembangan tugas belajar
 - PNS tugas belajar tidak dapat menyelesaikan tugas belajar tepat waktu sesuai SK Tugas Belajar
 9. Berkaitan dengan usulan formasi yang tidak semua terakomodir oleh Kemenpan & RB, sehingga jumlah pegawai yang pensiun tidak dapat terpenuhi
 10. Peraturan Menteri Pan & RB nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah, belum adanya keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan
 11. Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi praatama untuk mengisi kekosongan 2 JPT yang lowongan karena pensiun (Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan olahraga, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) tidak dilaksanakan pada tahun 2018 karena kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian PPK akan dilaksanakan tahun 2019

b. Solusi

Solusi yang dilakukan antara lain:

1. Penetapan SK Pensiun secara kolektif ditetapkan oleh PPK dan Petikan SK dapat didelegasikan
2. - Seleksi peserta diklatpim untuk mengikuti diklat dengan memprioritaskan pejabat struktural dengan riwayat jabatan telah menduduki jabatan struktural eselon V dan IV paling lama dan berusia mendekati batas usia pensiun (paling tinggi berusia 3 tahun sebelum BUP)
 - Koordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mengenai lokasi jumlah pengiriman peserta diklat kepemimpinan.
 - Menambah jumlah anggaran pengiriman peserta diklatpim tahun 2019
 - Meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi antar daerah Kabupaten/Kota
3. - Memberikan informasi mengenai materi ujian Dinas/UKPPI

- Mengirimkan surat edaran ke OPD mengenai usulan pelaksanaan Ujian Dinas/UKPPI tahun 2019 agar PNS tidak terlambat diusulkan mengikuti ujian serta untuk membuat perkiraan jumlah peserta Ujian Dinas/UKPPI
- 4. - Empat orang calon PNS golongan II pola pembibitan STTD mengikuti pelatihan dasar di Badan Diklat Provinsi Jawa Timur.
 - Tiga orang calon PNS golongan III pola pembibitan STTD mengikuti pelatihan dasar di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan
- 5. - Mengirimkan surat edaran ke OPD mengenai usulan pelaksanaan kebutuhan diklat teknis dan fungsional
 - Konsultasi dan koordinasi dengan lembaga penyelenggara diklat mengenai program diklat yang akan diselenggarakan
- 6. Mengajukan kembali usulan formasi yang kosong
- 7. Menerima pegawai yang masuk dari Kabupaten/Kota lain.
- 8. - Melakukan penyesuaian anggaran perubahan berdasarkan jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar
 - Koordinasi dengan pengelola kepegawaian semua OPD agar PNS tugas belajar menyampaikan laporan perkembangan setiap akhir semester tepat waktu
- 9. Mengusulkan jumlah formasi lebih dari jumlah yang pensiun sebagai cadangan apabila formasinya banyak yang tidak terakomodir
- 10. - Kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah (PI) diberikan apabila : formasi yang lowong berdasarkan anjab ABK, untuk pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah diperlukan keseragaman nomenklatur jabatan pelaksana, kualifikasi pendidikan dan tugas jabatan
 - Diadakan sosialisasi / rakor tentang kenaikan pangkat
- 11. Untuk mengisi kekosongan sementara waktu jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) terlebih dahulu

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 1 perihal Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah, Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kabupaten Semarang.

Untuk penyajian neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca awal terdahulu yaitu per 01 Januari 2004 pelaporan aset/kekayaan milik dan atau dikuasai oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian harga pasar yang dilakukan oleh konsultan appraisal pihak ketiga PT Survindo Putra Pratama (sesuai kontrak Nomor 050/01972/2003 tanggal 14 Mei 2003), sedangkan mutasi sesudahnya berdasarkan berdasarkan nilai perolehan.

Untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan iktisar pemakaian sumber daya ekonomi berdasarkan realisasi dana yang telah dipertanggungjawabkan dan telah dilakukan verifikasi.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu untuk disajikan meliputi:

1. Akuntansi Belanja
2. Persediaan
3. Kewajiban
4. Koreksi Kesalahan

5. Pengakuan Aktiva Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran

1. Akuntansi Belanja

Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawabn atas pengeluaran tersesbut disahkan oleh pengguna anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja bunga;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah;
- e. belanja bantuan sosial;
- f. belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintahan desa;
- g. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan
- h. belanja tidak terduga.

Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal;

2. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kepegiatan operasional Pemerintah Daerah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Pengukuran persediaan disajikan sebesar

- a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
- b. biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c. serta nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya, seperti donasi/rampasan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual/buku. Seluruh mutasi persediaan baik masuk maupun keluar serta saldo persediaan dicatat dalam pembukuan. Mutasi keluar-masuk barang dan pencatatannya menggunakan metode FIFO (First In First Out). Dengan metode ini barang yang dikeluarkan adalah barang yang lebih dahulu masuk, sehingga saldo persediaan adalah barang-barang persediaan yang berasal dari pembelian yang termuda/terakhir. Setiap jenis barang dibuatkan kartu persediaan. Setiap penerimaan barang, pengeluaran barang dan keadaan persediaan barang dicatat ke dalam kartu barang menurut jenisnya. Selanjutnya rekapitulasi mutasi dan saldo barang persediaan dicatat dalam buku persediaan. Setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan dan buku persediaan sehingga saldo/jumlah persediaan dapat diketahui sewaktu-waktu. Stock opname secara berkala terhadap barang persediaan yang ada untuk dicocokkan dengan saldo / jumlah barang persediaan yang ada di buku persediaan.

3. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah.

- a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika semua kewajiban dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika semua kewajiban dibayar lebih dari 12 bulan.
- c. Pada akhir periode pelaporan, saldo pengutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

4. Koreksi Kesalahan

- a. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
- b. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (dengan PERDA), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait.
- c. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.

5. Pengakuan Aset Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas bulan) untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus :

- a. Mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- d. Memenuhi batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap yang sudah ditetapkan

Kriteria material/tarif minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan karena pengadaan aset tetap (pembelian, hibah, donasi, pertukaran, dan lain-lain perolehan yang sah baik yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1	Tanah	Seluruhnya
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
	<i>Alat-alat berat</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat angkutan/kendaraan</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat bengkel dan alat ukur</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat pertanian/peternakan</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat kantor dan rumah tangga</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat studio dan alat komunikasi</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat kedokteran</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat laboratorium</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat keamanan</i>	$\geq 300.000,-$
3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas	
	<i>Bangunan gedung</i>	<i>Seluruhnya</i>
	<i>Bangunan monumen</i>	<i>Seluruhnya</i>
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas	
	<i>Jalan</i>	<i>Seluruhnya</i>
	<i>Jembatan</i>	<i>Seluruhnya</i>
	<i>Bangunan Air/Irigasi</i>	<i>Seluruhnya</i>
	<i>Jaringan dan Instalasi</i>	<i>Seluruhnya</i>

5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas	
	<i>Buku dan perpustakaan</i>	<i>Seluruhnya</i>
	<i>Barang bercorak kesenian</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Hewan/ternak dan tumbuhan</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat persenjataan</i>	$\geq 300.000,-$
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Seluruhnya

Kriteria material/tarif minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan disebabkan peningkatan nilai aktiva tetap karena diperluas, ditambah atau diperbesar adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Harga per Unit (RP)
1	Tanah	Seluruhnya
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
	<i>Alat-alat berat</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat angkutan/kendaraan</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat bengkel dan alat ukur</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat pertanian/peternakan</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat kantor dan rumah tangga</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat studio dan alat komunikasi</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat kedokteran</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat-alat laboratorium</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat keamanan</i>	$\geq 300.000,-$
3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas	
	<i>Bangunan gedung</i>	<i>Seluruhnya</i>
	<i>Bangunan monumen</i>	<i>Seluruhnya</i>
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas	
	<i>Jalan</i>	<i>Seluruhnya</i>
	<i>Jembatan</i>	<i>Seluruhnya</i>
	<i>Bangunan Air/Irigasi</i>	<i>Seluruhnya</i>
	<i>Jaringan dan Instalasi</i>	<i>Seluruhnya</i>
5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas	
	<i>Buku dan perpustakaan</i>	<i>Nihil</i>
	<i>Barang bercorak kesenian</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Hewan/ternak dan tumbuhan</i>	$\geq 300.000,-$
	<i>Alat persenjataan</i>	$\geq 300.000,-$
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Seluruhnya

Kriteria material/tarif minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan disebabkan karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan memperpanjang usia manfaat, meningkatnya efisiensi dan atau menurunnya biaya pengoperasian aktiva tetap, ditetapkan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah harga per unit (RP)
1	Tanah	Seluruhnya
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
	<i>Alat-alat berat</i>	$\geq 10.000.000,-$
	<i>Alat-alat angkutan/kendaraan</i>	$\geq 10.000.000,-$
	- roda empat	$\geq 2.000.000,-$
	- roda dua	$\geq 2.000.000,-$
	<i>Alat-alat bengkel dan alat ukur</i>	$\geq 1.000.000,-$
	<i>Alat-alat pertanian/peternakan</i>	$\geq 1.500.000,-$
	<i>Alat-alat kantor dan rumah tangga</i>	$\geq 1.500.000,-$
	<i>Alat studio dan alat komunikasi</i>	$\geq 1.000.000,-$
	<i>Alat-alat kedokteran</i>	$\geq 1.000.000,-$
	<i>Alat-alat laboratorium</i>	$\geq 1.000.000,-$
	<i>Alat keamanan</i>	$\geq 1.000.000,-$
3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas	
	<i>Bangunan gedung</i>	$\geq 100.000.000,-$
	<i>Bangunan monumen</i>	$\geq 100.000.000,-$
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas	
	<i>Jalan</i>	$\geq 100.000.000,-$
	<i>Jembatan</i>	$\geq 100.000.000,-$
	<i>Bangunan Air/Irigasi</i>	$\geq 100.000.000,-$
	<i>Jaringan dan Instalasi</i>	$\geq 100.000.000,-$
5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas	
	<i>Buku dan perpustakaan</i>	<i>Tidak dikapitalisasi</i>
	<i>Barang bercorak kesenian</i>	$\geq 1.000.000,-$
	<i>Hewan/ternak dan tumbuhan</i>	<i>Tidak Dikapitalisasi</i>
	<i>Alat persenjataan</i>	$\geq 1.000.000,-$
	Aktiva tak berwujud	$\geq 1.000.000,-$

Aset tetap diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dan telah diverifikasi dalam periode berkenaan.

Dalam pengakuan Aset telah dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan, dan penggantian utama.

Pengurangan adalah penurunan nilai Aset tetap karena berkurangnya kuantitas.

Pengurangan Aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan Aset tetap yang bersangkutan.

PENGUKURAN ASET TETAP

1. Tanah

Aset tanah yang disajikan dalam neraca berdasarkan tanah yang dimiliki dan atau dikuasai dan dilaporkan baik berasal dari perolehan hak, ataupun yang berasal dari instansi vertikal, dilaporkan berdasarkan posisi aset yang dimiliki.

2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai berdasarkan eksistensinya/ keberadaannya pada saat inventarisasi tanpa membedakan aset tersebut berasal dari hasil pembelian APBD, atau pelimpahan dari instansi vertikal, dan dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku saat inventarisasi, yang dilaporkan berdasarkan posisi aset yang dimiliki. Dengan nilai perolehan diatas Rp. 300.000,00 sebagai penambah aset tetap neraca.

4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya merupakan aset buku/aset tetap lainnya yang disajikan berdasarkan nilai perolehan wajar aset/barang. termasuk yang nilai perolehannya dibawah Rp 300.000,00.

5. Aset Lainnya

Aset Lainnya yaitu aset tak berwujud berupa aset software/ program aplikasi yang disajikan merupakan tambahan mutasi berdasarkan realisasi anggaran belanja modal yang dapat diinventarisasi dan dinilai dengan menggunakan harga perolehan.

PENYUSUTAN ASET TETAP

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam asset tetap.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus. Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Prosentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.

Rumusan perhitungan penyusutan berdasarkan metode garis lurus adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

TABEL Tarif Penyusutan Untuk Setiap Asset :

No	Uraian	Tarif Penyusutan (%)
1	Tanah	0%
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
	<i>Alat-alat berat</i>	5%
	<i>Alat-alat angkutan/kendaraan</i>	5%
	<i>Alat-alat bengkel dan alat ukur</i>	4%
	<i>Alat-alat pertanian/peternakan</i>	5%
	<i>Alat-alat kantor dan rumah tangga</i>	5%
	<i>Alat studio dan alat komunikasi</i>	5%

	<i>Alat-alat kedokteran</i>	8%
	<i>Alat-alat laboratorium</i>	8%
	<i>Alat keamanan</i>	5%
3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas	
	<i>Bangunan gedung</i>	4%
	<i>Bangunan monumen</i>	4%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas	
	<i>Jalan</i>	4%
	<i>Jembatan</i>	4%
	<i>Bangunan Air/Irigasi</i>	8%
	<i>Jaringan dan Instalasi</i>	4%
5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas	
	<i>Buku dan perpustakaan</i>	8%
	<i>Barang bercorak kesenian</i>	8%
	<i>Hewan/ternak dan tumbuhan</i>	0%
	<i>Alat persenjataan</i>	5%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0%

PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1 PENDAPATAN **Rp 0,00**

Tidak ada realisasi pendapatan ditahun 2018, karena Badan Kepegawaian Daerah tidak memiliki pendapatan daerah.

5.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Tidak ada realisasi pendapatan asli daerah ditahun 2018, karena Badan Kepegawaian Daerah tidak memiliki pendapatan asli daerah.

Pendapatan	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-

5.2 BELANJA **Rp 7.381.456.683,00**

Belanja yang direalisasikan Badan kepegawaian Daerah Kab.Semarang tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 7.381.4556.683,00 antara lain terdiri dari belanja operasi yang digunakan untuk membiayai belanja operasional dan belanja modal yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Penjelasan mengenai pos-pos belanja pada tahun anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	4.370.742.000,00	4.327.362.764,00	3.835.885.368,00
Belanja Barang/ Jasa	4.259.424.000,00	3.054.093.919,00	2.669.657.484,00
Jumlah	8.630.166.000,00	7.381.456.683,00	6.888.284.852,00

Realisasi belanja operasi untuk tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp.7.381.456.683,00 (85,53 %) dari jumlah anggaran sebesar Rp.8.630.166.000,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran ditahun 2017 mengalami kenaikan realisasi belanja operasi sebesar Rp. 493.171.831,00.

5.2.1.1 Belanja Pegawai**Rp 4.327.362.764,00**

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 4.327.362.764,00 terdiri dari belanja tidak langsung (gaji & tunjangan pegawai) dan belanja langsung (belanja pegawai). Rincian realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung :

a. Gaji dan Tunjangan	Rp	2.939.079.264,00
b. Tambahan Pengh. PNS	Rp	1.146.420.000,00
c. Tambahan.THR & Gaji 13	Rp	190.970.000,00
	Rp	4.276.469.264,00

Belanja Langsung :

a. Honorarium PNS	Rp	10.200.000,00
b. Uang Lembur	Rp	40.693.500,00
	Rp	50.893.500,00

5.2.1.2 Belanja Barang / Jasa**Rp 3.054.093.919,00**

Jumlah realisasi Belanja
Barang / Jasa terdiri dari :

a. Belanja Bahan Pakai Habis	Rp	134.833.992,00
b. Belanja Bahan/Material	Rp	20.413.000,00
c. Belanja Jasa Kantor	Rp	598.629.575,00
d. Belanja Premi Asuransi	Rp	1.612.155,00
e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp	39.212.794,00
f. Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp	108.795.700,00
g. Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang/Parkir	Rp	8.384.000,00
h. Sewa sarana mobilitas	Rp	28.800.000,00
i. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp	2.600.000,00
j. Belanja Makanan Dan Minuman	Rp	198.564.000,00
k. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	Rp	0,00
l. Belanja Perjalanan Dinas	Rp	911.545.703,00
m. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Rp	37.490.000,00
n. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Rp	855.013.000,00
o. Belanja Pemulangan Pegawai	Rp	10.000.000,00
p. Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa	Rp	31.000.000,00
q. Belanja Jasa Narasumber /Tenaga Ahli/Instruktur	Rp	67.200.000,00

5.2.2 BELANJA MODAL **Rp** **0,00**

Belanja Modal	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	382.742.000,00
Belanja Gedung dan bangunan	0,00	0,00	0,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah			

Tidak ada realisasi belanja modal ditahun 2018, karena Badan Kepegawaian Daerah tidak tidak menganggarkan untuk anggaran belanja modal di tahun 2018. Sehingga rincian realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.2.2.1 Belanja Tanah **Rp** **0,00**
Tidak ada realisasi Belanja Tanah

5.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin **Rp** **0,00**
Tidak ada realisasi Belanja Peralatan dan Mesin

5.2.2.3 Belanja Gedung dan Bagunan **Rp** **0,00**
Tidak ada realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

5.2.2.4 Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan **Rp** **0,00**
Tidak ada realisasi Belanja jalan, irigasi dan jaringan

5.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya **Rp** **0,00**
Tidak ada realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

5.2.2.6 Belanja Aset Lainnya **Rp** **0,00**
Tidak ada realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

PENJELASAN POS-POS NERACA

5.4	ASET	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
		Rp	3.219.026.936,50	Rp	3.407.169.563,50

Total aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.219.026.936,50 turun sebesar Rp.188.142.627,00 (5,52%) dibandingkan dengan total aset per 31 Desember 2017.

5.4.1	ASET LANCAR	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
		Rp	1.442.100,00	Rp	2.727.900,00

Jumlah aset lancar yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.442.100,00 jumlah tersebut turun sebesar Rp.1.285.800,00 (47,13%) dibandingkan dengan jumlah aset lancar per 31 Desember 2017. Aset lancar yang dimiliki tersebut adalah aset lancar berupa persediaan. Rincian dari aset lancar dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.4.1.1	Kas	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
		Rp	0,00	Rp	0,00

Jumlah kas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,00 Jumlah tersebut adalah saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian Daerah Kab. Semarang. Seluruh sisa kas pada akhir Desember 2018 telah disetorkan ke Kas Daerah.

5.4.1.2	Persediaan	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
		Rp	1.442.100,00	Rp	2.727.900,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan Perangkat Daerah. Nilai persediaan yang dimiliki dari hasil perhitungan fisik keseluruhan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.1.442.100,00. Jumlah tersebut adalah saldo akhir persediaan bahan pakai habis yang berupa persediaan alat tulis kantor & persediaan barang cetakan yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang per 31 Desember 2018 (untuk rinciannya dapat di lihat di lampiran daftar persediaan). Nilai tersebut turun dibandingkan dengan nilai persediaan tahun anggaran 2017.

5.4.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
		Rp	0,00	Rp	0,00

Jumlah investasi jangka panjang yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 0,00 karena Badan Kepegawaian Daerah Kab.Semarang tidak memiliki aset berupa investasi jangka panjang.

5.4.3 ASET TETAP	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Rp	3.122.200.036,50	Rp	3.287.685.263,50

Total aset tetap per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 3.122.200.036,50 turun sebesar Rp. 165.485.227,00 (5,03%) dibandingkan dengan total aset pada 31 Desember 2017. Penjelasan rincian penambahan dari total aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.4.3.1 Tanah	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Rp	664.800.000,00	Rp	664.800.000,00

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan nilai aset tetap tanah yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kab. Semarang sampai dengan akhir bulan Desember 2018, sehingga nilai tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp.664.800.000,00.

5.4.3.2 Peralatan dan Mesin	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Rp	2.403.127.116,00	Rp	2.258.127.116,00

Nilai aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 mengalami kenaikan, hal ini karena adanya penambahan aset tetap sejumlah Rp. 145.000.000,00. Penambahan ini berasal dari mutasi masuk alat angkutan darat bermotor dari BKUD, yaitu kendaraan roda 4 (empat) dengan nilai aset sebesar Rp. 145.000.000,00 (berdasarkan BA. Nomor: 030/42/2017, tanggal 17 Juli 2017). Perincian pemanfaatan nilai aset tetap peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Saldo Awal 2017 (Rp)	Mutasi Tambah /Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2018 (Rp)
Alat-alat Bantu	360.000,00	0,00	360.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	729.743.856,00	145.000.000,00	874.743.856,00
Alat Kantor	435.049.000,00	0,00	435.049.000,00
Alat Rumah Tangga	417.803.760,00	0,00	417.803.760,00
Komputer	555.468.000,00	0,00	555.468.000,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	29.387.500,00	0,00	29.387.500,00
Alat Studio	77.865.000,00	0,00	77.865.000,00
Alat Komunikasi	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Jumlah	2.258.127.116,00	145.000.000,00	2.403.127.116,00

5.4.3.3 Gedung & Bangunan	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Rp	2.036.534.140,00	Rp	2.036.534.140,00

Nilai aset tetap gedung dan bangunan yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kab.Semarang sampai bulan desember 2018, tidak ada penambahan maupun pengurangan aset, sehingga nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.2.036.534.140,00 dengan rincian pemanfaatan sebagai berikut :

Kelompok Pemanfaatan Bangunan	Saldo Awal 2017 (Rp)	MUTASI Tambah/Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2018 (Rp)
Bangunan Gedung Kantor	1.687.870.000,00	0,00	1.687.870.000,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	24.435.840,00	0,00	24.435.840,00
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	324.228.300,00	0,00	324.228.300,00
Jumlah	2.036.534.140,00	0,00	2.036.534.140,00

5.4.3.4 Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Rp	26.565.860,00	Rp	26.565.860,00

Nilai aset tetap lainnya yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kab.Semarang berupa buku peraturan perundang-undangan. Sampai akhir bulan Desember 2018 tidak ada penambahan maupun pengurangan aset, sehingga nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp.26.565.860,00 dengan rincian pemanfaatan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2017 (Rp)	MUTASI Tambah/Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2018 (Rp)
Umum	14.059.260,00	0,00	14.059.260,00
Ilmu Sosial	12.506.600,00	0,00	12.506.600,00
Jumlah	26.565.860,00	0,00	26.565.860,00

5.4.3.5 Akm Penyusutan	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Rp	(2.008.827.079,50)	Rp	(1.698.341.852,50)

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kab.Semarang tahun 2018 bertambah sebesar Rp. 310.485.227,00 (18,28%) dibandingkan tahun 2017. Sehingga saldo akhir akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2018 naik menjadi Rp.2.008.827.079,50 dengan perincian akumulasi penyusutan aset tetap sebagai berikut:

Uraian	Akm Penyusutan 2017 (Rp)	MUTASI Tambah / Kurang (Rp)	Akm Penyusutan 2018 (Rp)
Tanah	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Peralatan dan Mesin	(797.833.557,50)	(226.664.786,00)	(1.024.498.343,50)
Alat-alat bantu	(280.000,00)	(20.000,00)	(300.000,00)
Alat Angkutan darat	(225.686.504,50)	(152.166.359,00)	(377.852.863,50)
Alat Kantor	(77.049.800,00)	(20.054.550,00)	(97.104.350,00)
Alat Rumah Tangga	(195.377.870,00)	(20.470.981,00)	(215.848.851,00)
Peralatan Komputer	(230.717.828,00)	(28.048.034,00)	(258.765.862,00)
Meja dan kursi kerja/rapat Pejabat	(16.415.555,00)	(1.491.112,00)	(17.906.667,00)
Alat Studio	(42.424.000,00)	(3.780.750,00)	(46.204.750,00)
Alat Komunikasi	(8.730.000,00)	(585.000,00)	(9.315.000,00)
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	(1.152.000,00)	(48.000,00)	(1.200.000,00)
Gedung dan Bangunan	(878.750.104,00)	(82.011.172,00)	(960.761.276,00)
Gedung dan Bangunan	(878.750.104,00)	(82.011.172,00)	(960.761.276,00)
Aset Tetap Lainnya	(21.758.191,00)	(1.809.269,00)	(23.567.460,00)
Buku	(21.758.191,00)	(1.809.269,00)	(23.567.460,00)
Jumlah	(1.698.341.852,50)	(310.485.227,00)	(2.008.827.076,50)

Apabila dilihat dari nilai mutasi penambahan akumulasi penyusutan alat angkutan daerah sebesar Rp. 152.166.359,00 nilainya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal tersebut karena adanya mutasi masuk akumulasi penyusutan yang berasal dari kendaraan bermotor roda 4 (empat) dari BKUD Kab. Semarang sebesar Rp.108.750.000,00.

5.4.4 ASET LAINNYA

31 Desember 2018		31 Desember 2017	
Rp		Rp	
	95.384.800,00		116.756.400,00

Aset lainnya yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kab.Semarang per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 95.384.800,00 apabila dibandingkan dengan saldo aset lainnya per 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp.21.371.600,00 (turun 18,30%). Penjelasan dari rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.4.4.1 Aset Tak Berwujud Lainnya

31 Desember 2018		31 Desember 2017	
Rp	131.006.000,00	Rp	245.041.000,00

Nilai aset lainnya berupa aset tidak berwujud sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.131.006.000,00 jumlah tersebut adalah aplikasi kepegawaian (software). Apabila dibandingkan dengan aset tak berwujud pada tahun 2017 nilainya mengalami penurunan sebesar Rp.114.035.000,00, hal ini karena adanya penghapusan aplikasi kepegawaian berdasarkan SK.Nomor :028.3/0739/2018. Rincian pemanfaatan aset tak berwujud lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	Saldo Awal 2017 (Rp)	MUTASI Tambah (Kurang)	Saldo Akhir 2018 (Rp)
E-Jab Fungsional	26.400.000,00	(26.400.000,00)	0,00
E-Mutasi	25.300.000,00	(25.300.000,00)	0,00
E-Profil Pegawai	26.550.000,00	(26.550.000,00)	0,00
E-Struktural Jabatan	22.000.000,00	(22.000.000,00)	0,00
Pengelolaan Data PTT	13.785.000,00	(13.785.000,00)	0,00
E-Personal	36.200.000,00	0,00	36.200.000,00
E-File	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
E-Kinerja	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
Absensi & Jaringan	36.806.000,00	0,00	36.806.000,00
Jumlah	245.041.000,00	114.035.000,00	131.006.000,00

5.4.4.2 Akm. Amortisasi

31 Desember 2018		31 Desember 2017	
Rp	35.621.200,00	Rp	128.284.600,00

Nilai akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kab.Semarang adalah aplikasi kepegawaian, saldo per 31 Desember 2018 turun sebesar Rp.92.663.400,00 (72,23%), sehingga nilai akumulasi amortisasi aset tak berwujud lainnya per 31 Desember 2018 menjadi Rp. 35.621.200,00 dengan rincian pemanfaatan sebagai berikut :

Uraian	Akm Penyusutan 2017 (Rp)	MUTASI Tambah/ Kurang (Rp)	Akm Penyusutan 2018 (Rp)
Software	(128.284.600,00)	(92.663.400,00)	(35.621.200,00)
Jumlah	(128.284.600,00)	(92.663.400,00)	(35.621.200,00)

5.5	KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
		Rp	3.219.026.936,50,00	Rp	3.407.169.563,50

5.5.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
		Rp	0,00	Rp	0,00

Jumlah kewajiban jangka pendek yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 0,00 karena Badan Kepegawaian Daerah Kab.Semarang tidak memiliki kewajiban jangka pendek.

5.5.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
		Rp	0,00	Rp	0,00

Jumlah kewajiban jangka panjang yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 0,00 karena Badan Kepegawaian Daerah Kab.Semarang tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

5.6	EKUITAS	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
		Rp	3.219.026.936,50	Rp	3.407.169.563,50

Terdapat pengurangan nilai ekuitas yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kab.Semarang sampai dengan akhir bulan Desember 2018 sebesar Rp.188.142.627,00 sehingga nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.219.026.936,50 dengan rincian pemanfaatan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2017 (Rp)	MUTASI Tambah (Kurang)	Saldo Akhir 2018 (Rp)
Ekuitas	3.407.169.563,50	188.142.627,00	3.219.026.936,50
Jumlah	3.407.169.563,50	188.142.627,00	3.219.026.936,50

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Nomor Urut	Uraian	Saldo 2018 (Rupiah)	Saldo 2017 (Rupiah)
1	2	3	4
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00
	<i>Tidak ada realisasi pendapatan</i>		
8.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	0,00	0,00
8.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO		
8.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO		
8.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO		
8.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO		
8.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00
8.2.1.	Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00
8.2.1.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO		
8.2.1.02	Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak - LO		
8.2.1.03	Pendapatan Dana Alokasi Umum - LO		
8.2.1.04	Pendapatan Dana Alokasi Khusus - LO		
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00
8.2.2.01	Dana Otonomi Khusus - LO		
8.2.2.02	Dana Penyesuaian - LO		
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00

8.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO		
8.2.3.02	Pendapatan Bagi Hasil lainnya - LO		
8.2.3.03	Pendapatan dana otonomi khusus lainnya - LO		
8.2.4	Bantuan Keuangan LO	0,00	0,00
8.2.4.01	Bantuan Keuangan dari pemda Provinsi lainnya - LO		
8.2.4.02	Bantuan Keuangan dari pemerintah Daerah Kabupaten - LO		
8.2.4.03	Bantuan Keuangan dari pemerintah Daerah Kota - LRA		
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO		
8.3.2	Pendapatan Dana Darurat - LO		
8.3.3	Pendapatan lainnya- LO		
	Jumlah Pendapatan- LO	0,00	0,00
9	BEBAN	7.599.646.060,00	6.709.990.150,50
9.1	BEBAN OPERASI	7.599.646.060,00	6.709.990.150,50
9.1.1.	Beban Pegawai	4.327.362.764,00	3.835.885.368,00
9.1.2.	Beban Barang dan Jasa	3.055.379.719,00	2.671.255.484,00
9.1.3.	Beban Bunga		
9.1.4	Beban Subsidi		
9.1.5	Beban Hibah		
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	216.903.577,00	203.075.450,50
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang		

9.1.9	Beban lain-lain		
9.2	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00
9.2.1.	Beban transfer bagi hasil pajak daerah		
9.2.2.	Beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya		
9.2.3	Beban transfer bantuan keuangan ke pemda lainnya		
9.2.4	Beban transfer bantuan keuangan ke desa		
9.2.5	Beban transfer bantuan keuangan lainnya		
9.2.6	beban tranfer dana otonomi khusus		
	Jumlah Beban	7.599.646.060,00	6.709.990.150,50
	Surplus/ (Defisit) dari operasi	(7.599.646.060,00)	(6.709.990.150,50)
8.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00
8.4.1	Surplus penjualan aset non lancar - LO		
8.4.2	Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang - LO		
8.4.3	Surplus dari kegiatan Non Opearsional lainnya		
9.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00
9.3.1	Defisit penjualan aset non lancar		
9.3.2	Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang		
9.3.3	Defisit dari kegiatan non operasional		
	SURPULS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	0,00	0,00

8.5	PENDAPATAN LUAR BIASA	0,00	0,00
8.5.1	Pendapatan Pos luar biasa		
9.4	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa		
	surplus/defisit pos luar biasa	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT LO	(7.600.335.307,00)	(6.709.990.150,50)

PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Nomor Urut	Uraian	Saldo 2018 (Rupiah)	Saldo 2017 (Rupiah)
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	(15.356.828.358,50)	(8.646.612.056,00)
2	RK PPKD	26.175.501.355,00	18.763.997.922,00
3	SURPLUS/DEFISIT LO	(7.599.646.060,00)	(6.710.216.302,50)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
4	EKUITAS AKHIR	3.219.026.936,50	3.407.169.563,50

BAB VI

PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Organisasi

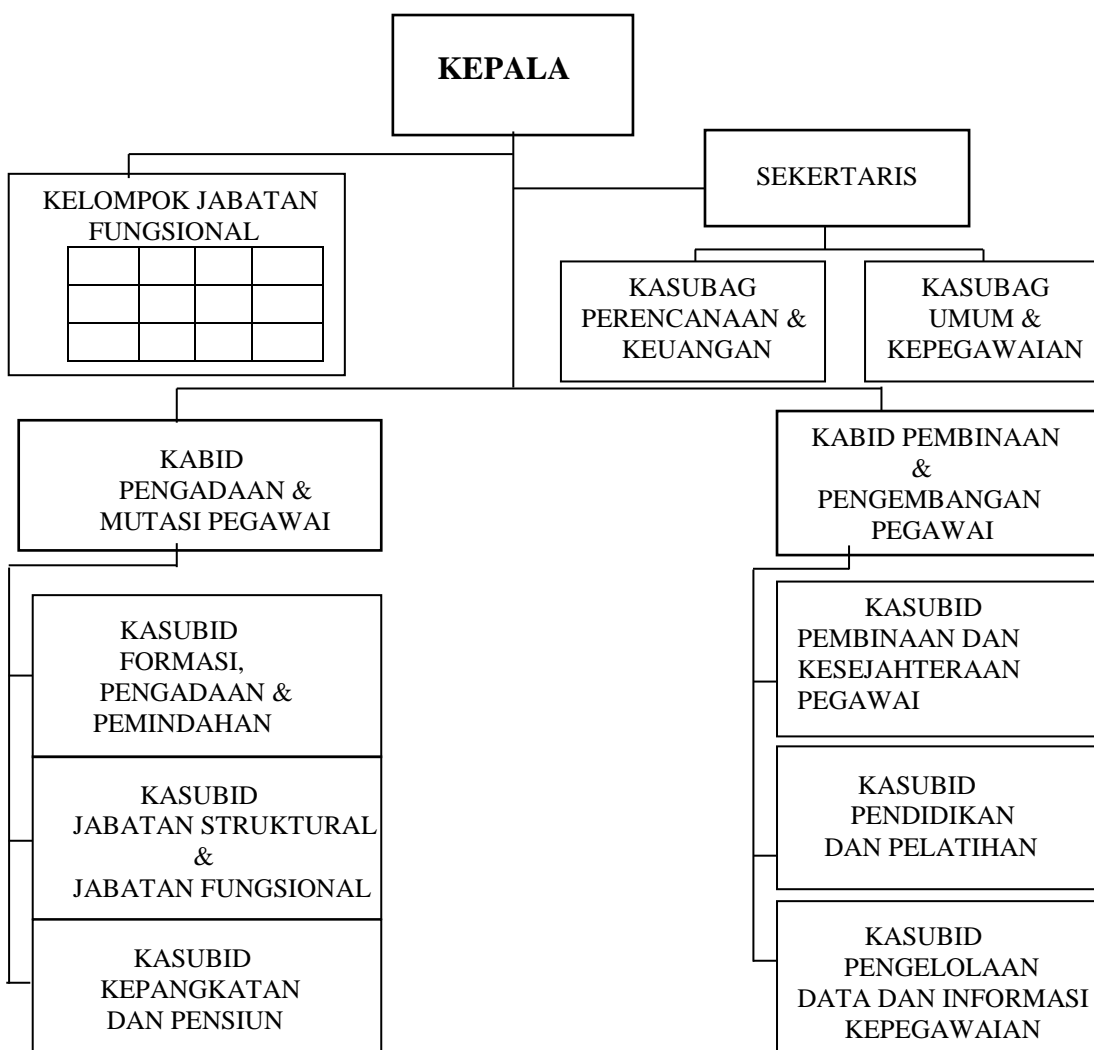
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Semarang yang melaksanakan kegiatan dibidang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Lampiran XXIII Peraturan Bupati Semarang.
Nomor : 52 Th. 2016



6.2 Kebijakan

6.2.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang No.52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Peranngkat Daerah Kabupaten Semarang. SOTK Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

6.2.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang mempunyai fungsi :

- Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian berdasarkan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah ;
- Perencanaan dan pengembangan Kepegawaian Daerah ;
- Penyiapan dan pelaksanaan dan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian PNS Daerah berdasarkan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan ;
- Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional berdasarkan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan ;

6.3 Struktur Kepegawaian / SDM

Untuk menyelenggarakan tugas pokok membantu Bupati Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Finansial, maupun prasarana dan sarana.

Dalam mengembangkan tugas pembangunan dibidang aparatur pemerintah (ASN) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang memiliki power Sumber Daya Manusia sebanyak 48 orang personil/pegawai yang meliputi 12 pejabat struktural, 8 staf fungsional dan 28 staf umum. Dengan rincian sebagai berikut :

a. Eselon II B	: 1 orang
b. Eselon III A	: 1 orang
c. Eselon III B	: 2 orang
c. Eselon IV A	: 8 orang
d. Staf Fungsional	: 8 orang
e. Staf umum	: 28 orang

Tabel jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) per 31 Desember 2018 :

Golongan	ESELON				NON ESELON		Total
	II	III	IV	V	Fungsional	Staf	
IV/e	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	1	-	-	-	-	-	1
IV/b	-	1	-	-	-	-	1
IV/a	-	2	1	-	-	-	3
Jumlah	1	3	1	-	-	-	5
III/d	-	-	7	-	3	3	13
III/c	-	-	-	-	1	6	7
III/b	-	-	-	-	3	6	9
III/a	-	-	-	-	-	7	7
Jumlah	-	-	7	-	7	22	36
II/d	-	-	-	-	-	-	-
II/c	-	-	-	-	1	3	4
II/b	-	-	-	-	-	1	1
II/a	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	1	4	5
I/d	-	-	-	-	-	2	2
I/c	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-
I/a	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	2	2
TOTAL	1	3	8	-	8	28	48

BAB VII

PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 ini dibuat sebagai salah satu bagian dari laporan pertanggungjawaban keuangan di Perangkat Daerah, selain laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas yang kesemuanya merupakan satu kesatuan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan yang wajib dibuat selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian akan dikonsolidasikan untuk menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hasil penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang, berikut ini akan dijelaskan secara garis besar isi dari laporan keuangan sebagai berikut :

A. Pencapaian Realisasi Belanja

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4.370.742.000,00	4.327.362.764,00	99,00
Belanja Barang & Jasa	4.259.424.000,00	3.054.093.919,00	71,70
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah	8.630.166.000,00	7.381.456.683,00	85,53

Secara keseluruhan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2018 dapat terealisasi sebesar Rp. 7.381.456.683,00 (85,53%) dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 8.630.166.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 4.327.362.764,00 dan belanja barang & jasa sebesar Rp. 3.054.093.919,00. Tidak ada realisasi belanja modal di tahun 2018, karena Badan Kepegawaian Daerah tidak menganggarkan belanja modal.

B. Pencapaian Realisasi Program

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	%
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	480.733.000,00	439.880.298,00	91,50

B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	46.000.000,00	45.212.794,00	98,28
C	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	36.525.000,00	35.382.959,00	96,87
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	14.500.000,00	14.465.476,00	99,76
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.625.000,00	8.625.000,00	100,00
F	Program Perencanaan	13.630.000,00	13.463.000,00	98,77
G	Program Pendidikan Kedinasan (Kepegawaian)	759.425.000,00	741.897.146,00	97,69
H	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian)	651.666.000,00	646.350.253,00	99,18
I	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaian)	2.299.430.000,00	1.139.719.507,00	49,56
Jumlah		4.310.534.000,00	3.104.987.419,00	72,03

Bila dikaitkan dengan program dan kegiatan sesuai bidang kewenangannya, anggaran yang tersedia untuk belanja langsung tahun anggaran 2018 sejumlah Rp.4.310.534.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 3.104.987.419,00 (72,03%) yang teralokasi pada 10 (sepuluh) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan.

C. Posisi Neraca

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2017
Aset :		
Aset Lancar	1.442.100,00	2.727.900,00
Aset Tetap	3.122.200.036,50	3.287.685.263,50
Aset Lainnya	95,384.800,00	116.756.400,00
Jumlah Aset	3.219.026.936,50	3.407.169.563,50
Ekuitas :		
Kewajiban	0,00	0,00
Ekuitas Dana	3.219.026.936,50	3.407.169.563,50
Jumlah Kewajiban & Ekuitas Dana	3.219.026.936,50	3.407.169.563,50

Jumlah Aset yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.3.219.026.936,50, Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.188.142.627,00 (5,52%) dibandingkan dengan posisi aset per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.3.407.169.563,50. Penurunan jumlah aset tersebut antara

lain disebabkan karena adanya penurunan nilai persediaan, penyusutan aset tetap dan penghapusan aset tetap berupa aplikasi kepegawaian (*software*).

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini dibuat, yang berisi penjelasan atas realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam tahun anggaran 2018. Dengan laporan keuangan ini mudah-mudahan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penentuan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang pada tahun anggaran yang akan datang.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

PARTONO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196602221992031007